

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa Rifka dan Henny Murtini, 2018, “The Determinant of Regional Financial Information Transparency on the Official Website of Local Government,” *Accounting Analysis Journal*. Vol 7 (1), h. 43-51.
- Diptyana Pepie dan Nur’aini Rokhmania, 2018, “Exploring government internet financial reporting in Indonesia,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol 21 (1), h. 115-138.
- Ghozali, Imam, 2013, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS21 Update PLS Regresi*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasanah, Uswatun, 2016, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Publikasi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah melalui Internet*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- Hilmi Amirudin Z. dan Dwi Martani, 2012, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi,” *Jurnal Prosiding dan Simposium Nasional Akuntansi*, Universitas Indonesia.
- Indriantoro, Nur, dan Bambang Supomo, 2016, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Istikomah dan Kurniawati Mutmainah, Januari 2017, “Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui Internet,” *Fakultas Ekonomi Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah*. Volume 12 (1), ISSN: 1907-426X.
- Laswad, F. Fisher R. dan Oyelere, P., 2005, “Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities,” *Journal of Accounting and Public Policy*. Vol. 2, h.101-121
- Lesmanawati, Dewi, 2019, “Pengaruh Local Government Wealth, Intergovernmental Revenue dan Opini Audit Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia Secara Online,” *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Vol. 15 (2), h. 109-116.
- Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI.

- Mutiha, Arthaingan H., Juli 2017, "Faktor Penentu Aksesibilitas *Internet Financial Reporting* pada *E-Government* Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Barat," *Seminar Nasional Akuntansi dan Bisnis Universitas WidyaYatama*. ISSN: 2252-39936.
- Verawaty, 2017, "Determinan Transparansi Informasi Keuangan Daerah melalui *E-Government* Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan," *Akuisisi Journal of Accounting & Finance*. Volume 13 (2), P 92-107.
- Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan.
- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Petanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.
- Puspita Rora dan Dwi Martani, 2012, *Analisis pengaruh kinerja dan karakteristik pemda terhadap tingkat pengungkapan dan kualitas informasi dalam website pemda*, Skripsi, Universitas Indonesia, Depok.
- Rahman, Aditya P. dkk, September 2013, "Determinan Internet Financial Local Government Reporting di Indonesia," *Simposium Nasional Akuntansi XVI*, Manado.
- Republik Indonesia, 2010, *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, Bandung: Fokusindo Mandiri.
- Setyowati, Lilis, April 2016, "Determinan yang Mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah," *Esensi Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Volume 6 (1), P 45-62.
- Susbiyani, Arik, 2015, "Quality Of Financial Statements As Implementation Good Governance Government On Local Government In Indonesia," *Research Journal Of Finance And Accounting*. Volume 6 (14), ISSN: 2222-1697.
- Susbiyani, Arik dkk, 2014, "The Compliance With Mandatory Disclosure Of Financial Statement: A Study From Local Government In Indonesia," *Research Journal Of Finance And Accounting*. Volume 5 (10), ISSN: 2222-1697.

- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

